



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
 - b. bahwa DPRD Kabupaten Sanggau melalui Bapemperda bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau telah melaksanakan rapat kerja pada tanggal 29 September 2025 dalam rangka usulan Penetapan terhadap Propemperda Kabupaten Sanggau Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 29).

Memperhatikan : 1. Keputusan DPRD Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Persetujuan Terhadap Usulan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Untuk Menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2026;

2. Surat Bupati Sanggau Nomor 100.1.4.4/134/HK tanggal 12 September 2025 Perihal Penyampaian Propemperda Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman bagi DPRD Kabupaten Sanggau dan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam Pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2026.

KETIGA

- : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau.

Pada tanggal 30 September 2025.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
WAKIL KETUA,



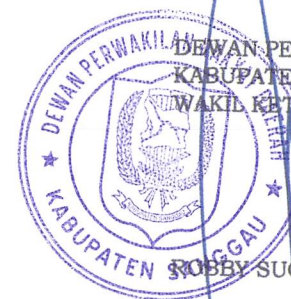
ROBBY SUGIANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR : 12 TAHUN 2025
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2025
 TENTANG : PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan/ Ket.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rancangan Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	√	-	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; - Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	-	-	- BPKAD - BAPPEDA - BAGIAN HUKUM	Tahun 2026	Sangat Penting
2	Rancangan Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.	-	√	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; - Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	-	-	- BPKAD - BAPPEDA - BAGIAN HUKUM	Tahun 2026	Sangat Penting
3	Rancangan Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.	√	-	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; - Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.	-	-	- BPKAD - BAPPEDA - BAGIAN HUKUM	Tahun 2026	Sangat Penting
4	Rancangan Peraturan Daerah	Izin Membuka Tanah	Subjek dan objek, prosedur memperoleh izin membuka tanah, penolakan izin membuka tanah, masa berlaku dan perpanjangan izin, hak dan kewajiban, mutasi tanah, dan penyelesaian sengketa.	√	-	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; - Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.	-	√	- Dinas Perkimtan - DPMPTSP - Dinas PUPR - DINAS BUNNAK - BAPPEDA - BAGIAN HUKUM	Tahun 2026	Penting
5	Rancangan Peraturan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Sanggau	√	-	- Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; - Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.	-	√	- BPKAD - BAPPEDA - BAGIAN HUKUM	Tahun 2026	Penting
6	Rancangan Peraturan Daerah	Pengarusutamaan Gender	Peningkatan peran perempuan diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Hak yang sama antara laki-laki dan perempuan harus dijamin sesuai	√	-	- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;	√		- DINSOSP3AKB - BAGIAN HUKUM	Tahun 2026	Sangat Penting

			amanat UUD 1945. Pembangunan wajib mengakomodasi kepentingan keduanya agar hasilnya dapat dinikmati secara berimbang dengan memberikan akses dan kesempatan yang setara.			- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.					
7	Rancangan Peraturan Daerah	Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif	Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif belum mengakomodasi kebutuhan terkini, seperti pengaturan kawasan kreatif, kelengkapan subsektor industri, perlindungan pelaku, mekanisme pengawasan, pemberian insentif, dan pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Daerah. Karena itu, perlu pembaruan perda agar selaras dengan kebijakan nasional, memperkuat ekosistem kreatif lokal, serta memberikan perlindungan hukum, kepastian usaha, dan dukungan nyata bagi pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Sanggau.	√	-	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif; - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif; - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif; - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. - Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.	√	√	- DISPORAPAR - DEKRANASDA - DINAS PUPR - BAGIAN HUKUM	Tahun 2026	Sangat Penting
8	Rancangan Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Perikanan	Perikanan darat di Kabupaten Sanggau berperan penting bagi ketahanan pangan dan ekonomi. Potensi perairan perlu dioptimalkan secara ramah lingkungan dengan tata niaga jelas, infrastruktur memadai, serta pemberdayaan	√	-	- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9). Sebagai Undang-Undang; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	-	√	- DKPTPHP - BAGIAN HUKUM	Tahun 2026	Sangat Penting

			pelaku perikanan. Dengan pengelolaan yang baik, sektor ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber pendapatan daerah berkelanjutan.			- Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil; - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan sebagian telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur.					
9	Rancangan Peraturan Daerah	Hari Besar Daerah	Rancangan Perda tentang Hari Besar Daerah penting untuk melestarikan budaya, memperkuat identitas lokal, dan mengembangkan pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Pengaturannya memberi kepastian hukum, menjamin peringatan berjalan tertib dan berkelanjutan, sekaligus menjadi wujud otonomi daerah dalam memaksimalkan potensi lokal.	√	-	-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan hari besar daerah sesuai kearifan lokal; -Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;	√	-	- DISPORAPAR - DINAS PENDIDIKAN - BAPERRIDA - BAGIAN HUKUM	Tahun 2026	Sangat Penting



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
WAKIL KETUA,

ROBBY SUGIANTO